



ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT RAKYAT
DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Oleh

Riyadi Mustofa¹, Riati Bakce²

^{1,2}Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Persada Bunda Pekanbaru

E-mail: ¹riyadimustofa@gmail.com, ²riatibakce@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek sosial dan ekonomi petani kelapa sawit rakyat. Penelitian ini bermanfaat bagi petani dalam meningkatkan kemampuan usahatani sehingga produktivitas kelapa sawit meningkat. Data penelitian terdiri dari primer merupakan data yang langsung dikumpulkan dari petani. Data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Hasil penelitian menunjukkan usahatani kelapa sawit secara sosial antara lain: mayoritas petani mengusahakan lahan kebun kelapa sawit seluas 1-5 ha dengan legalitas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di umumnya masih SKGR. Tingkat pendidikan petani rerata SLTA sederajat. Ditinjau dari pengalaman usahatani kelapa sawit menunjukkan mayoritas pengalaman usahatani petani antara 11-20 tahun. Secara ekonomi menunjukkan bahwa luas lahan 4,25 ha dengan produktivitas 830 (kg/ha/bln) dan pendapatan bersih Rp. 395.474/ha/bln lebih rendah dari pendapatan petani secara nasional.

Kata Kunci: Aspek Sosial, Aspek Ekonomi Dan Kelapa Sawit

PENDAHULUAN

Pembangunan perkebunan kelapa sawit merupakan aktivitas yang memberikan kontribusi pada aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan kepatuhan terhadap hukum. Kelapa sawit memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi masyarakat. Dampak pembangunan perkebunan kelapa sawit berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, ekonomi suatu daerah, dan pertumbuhan ekonomi lokal di pedesaan termasuk pembangunan sumberdaya manusia (Purba & Sipayung, 2017). Sektor hulu perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi terhadap mata pencaharian masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan, penyediaan lapangan usaha dan ketersediaan sarana dan prasarana sosial (Suwondo et al., 2020). Pada sektor hilir perkebunan kelapa sawit menghasilkan industri turunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunan lainnya yang menghasilkan

devisa bagi negara (Agustira et al., 2015). Produk turunan kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan pangan melalui industri oleopangan dan sebagai bahan industri oleokimia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi (Faizal et al., 2018). Besarnya manfaat produk turunan kelapa sawit menyebabkan permintaan akan produk tersebut terus mengalami peningkatan.

Petani perkebunan kelapa sawit rakyat terutama petani swadaya pada umumnya masih berada pada tingkat produktivitas yang rendah dibawah 11 ton TBS/Ha/Tahun (Purba & Sipayung, 2017), petani swadaya pada umumnya belum menggunakan bibit unggul dan melakukan Good Agricultural Practices (GAP) (Mulono et al., 2021). Pembangunan pertanian mencakup berbagai aspek antara lain yakni sumberdaya lahan, plasma nuftah, air, teknologi, pembiayaan dan sumberdaya manusia (SDM). Tujuan pembangunan pertanian adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani melalui



peningkatan produksi pertanian. Salah satu sub sektor pertanian yang berkontribusi adalah sub sector perkebunan kelapa sawit (Mustofa, 2021). Cerahnya prospek komoditas kelapa sawit dalam perdagangan minyak nabati dunia telah mendorong pemerintah Indonesia untuk memacu peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit melalui penerapan GAP melalui keikutsertaan petani dalam sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Kontribusi sosial perkebunan mampu menciptakan lapangan pekerjaan, lapangan berusaha, meningkatkan kesejahteraan, pendidikan petani dan masyarakat disekitarnya. Kesejahteraan petani salah satunya dapat dilihat dari banyaknya mobilitas penduduk, telah memperoleh wajib belajar dan telah terpenuhi kebutuhan pangan (Agustira et al., 2015). Secara ekonomi, petani kelapa sawit menerima pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Syahza & Suarman, 2018). Tingginya pendapatan petani tersebut memicu tingginya permintaan lahan, sedangkan lahan yang tersedia terbatas. Untuk memenuhi permintaan lahan petani melakukan konversi dan alih fungsi lahan baik dari lahan pertanian maupun dari lahan perkebunan lainnya. Upaya ekstensifikasi telah berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder

Kabupaten Indarigiri Hulu merupakan salah satu kabupaten yang memiliki perkebunan kelapa sawit sebagai komoditi unggulan. Luas dan produksi kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu terus meningkat, pada tahun 2018 luas kebun 53.891 ha dengan produksi sebanyak 222.705 ton. Pada tahun 2019 luas kebun kelapa sawit 56.885 ha dengan produksi sebanyak 229,386 (Badan Pusat

Statistik, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1). Karakteristik sosial petani kelapa sawit rakyat, dan (2). Karakteristik ekonomi petani kelapa sawit rakyat,. Tujuan penelitian untuk mengetahui untuk mengetahui kondisi eksisting perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu dari aspek sosial dan ekonomi. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi petani dalam meningkatkan kemampuan usahatani sehingga produktivitas kelapa sawit meningkat.

LANDASAN TEORI

Sektor pertanian meliputi usahatani pertanian, peternakan, perikanan, dan pemungutan hasil laut. Perkebunan merupakan salah satu sub sektor pertanian dimana hasil usahatani digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Saeri, 2018). Perkebunan merupakan tanaman yang memiliki rentang waktu hidupnya lama, bersifat mengawetkan tanah, tidak perlu dikelola secara intensif dan berbasis lahan. Lahan perkebunan adalah lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian minimal selama dua tahun tidak dilakukan pergantian tanaman (Saeri, 2018). Perkebunan rakyat merupakan usaha tanaman perkebunan yang dimiliki atau dikelola oleh perorangan dan tidak berbadan hukum. Keberhasilan Pengusahaan pekerbunan kelapa sawit rakyat dapat ditentukan oleh aspek social dan ekonomi petani. Aspek sosial dapat diukur dari dua indikator yaitu luas lahan dan pendidikan petani. Perluasan lahan dilakukan atas dasar dua tujuan yaitu peningkatan produksi melalui ekstensifikasi dan meningkatkan produktivitas lahan sebagai upaya perbaikan dari lahan sebelumnya untuk meningkatkan daya saing, dan efisiensi kelestarian lingkungan (Choong and McKay, 2014).

Kepemilikan luas lahan sebagai gambaran kesejahteraan dan status sosial petani di masyarakat selain pendidikan (Amalia et al., 2017). Luas lahan menjadi penentu besaran skala usaha, organisasi tata kerja, penggunaan teknologi, penggunaan faktor-faktor produksi,



dan perizinan yang harus dimiliki dalam usahatani kelapa sawit (Pahan, 2012). Semakin luas lahan yang digunakan dalam usahatani perkebunan akan mempengaruhi teknis dalam pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengangkutan hingga sistem pemasaran dan harga output (Evizal, 2014). Sehingga luas lahan memiliki peran penting dalam menentukan harga output yang berkontribusi terhadap besarnya pendapatan dan kesejahteraan petani (Syahza *et al.*, 2020). Luas penguasaan atau kepemilikan lahan usahatani dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu: petani skala kecil dengan luas lahan usahatani <0,5 ha, skala menengah dengan luas lahan usahatani 0,5-1,0 ha, dan skala luas dengan luas lahan usahatani >1,0 ha (Mulyani and Agus, 2018).

Aspek sosial lain dari petani kelapa sawit rakyat dapat dilihat dari tingkat pendidikan petani. Pendidikan dan pengetahuan berperan dalam penerapan teknologi yang akan digunakan dalam melakukan usahatani. Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk peningkatan produktivitas usahatani dan pendapatan petani (Pahan, 2015). Pendidikan merupakan perwujudan tingkat status sosial seseorang dalam keluarga di masyarakat (Mahmud, 2019) dan mencerminkan kemampuan menganalisis informasi menentukan dalam pengambilan keputusan. Pendidikan petani tidak hanya secara formal, namun secara informal yang diperoleh melalui bimbingan dan pelatihan untuk mendukung usahatani kelapa sawit.

Peningkatan sumberdaya manusia dalam dilakukan melalui pendidikan jangka pendek yaitu pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan manajerial perkebunan (Wigena *et al.*, 2016). Sedangkan dalam jangka panjang peningkatan sumberdaya manusia dilakukan melalui tata kelola perkebunan menuju pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan. Tingkat pendidikan petani menjadi indikator kesejahteraan

masyarakat disekitar perkebunan kelapa sawit, peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani terutama pada petani plasma (Mustofa *et al.*, 2021).

Aspek ekonomi dapat diukur dari dua indikator yaitu produktivitas lahan dan pendapatan petani. Produktivitas lahan dapat diukur dari produksi selama kurun waktu tertentu dibagi dengan luas lahan, sedangkan pendapatan rumah tangga petani terdiri dari pendapatan dari kegiatan di luar pertanian dan pendapatan dari usahatani (Saeri, 2018). Peningkatan pendapatan dari non pertanian sejalan dengan terbukanya lapangan kerja usaha non pertanian (Suwondo *et al.*, 2021). Produktivitas lahan merupakan perbandingan antara input dengan output yang dihitung dengan satuan kg/ha/thn. Produktivitas lahan dapat dipengaruhi oleh berbagai tipologi jenis lahan (Pahan, 2008) yang meliputi: a). fisik dan kimia lahan, lahan yang memiliki ciri fisik dan kimia tanah subur akan menghasilkan produksi lebih tinggi; b). status kepemilikan lahan, jika lahan milik sendiri maka produktivitas lahan lebih tinggi karena tidak mengeluarkan biaya sewa atas lahan; c). Tenaga Kerja, besar kecilnya peranan tenaga kerja terhadap hasil usahatani dipengaruhi oleh keterampilan kerja yang tercermin dari tingkat produktivitasnya d). Modal, modal dapat berupa lahan, tenaga kerja dan dalam bentuk investasi uang (Lubis, 2008).

Pendapatan petani juga ditentukan oleh kualitas buah, letak kebun, dan sarana serta prasarana penunjang. Kualitas buah yang buruk dengan letak yang kebun yang terpencar serta sarana jalan yang rusak akan mengurangi harga TBS dan menambah biaya angkut, sehingga menambah biaya produksi dan mengurangi pendapatan bagi petani (Pahan, 2012). Perhitungan pendapatan usahatani kelapa sawit petani kelapa sawit dilakukan dengan dasar perhitungan pendapatan tertinggi, terendah dan rata-rata. Semakin tinggi peningkatan pendapatan petani dapat meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk



kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder (Syahza, Robin, et al., 2021). Kebutuhan primer dikenal dengan kebutuhan sembilan bahan pokok (sembako), sedangkan kebutuhan sekunder bertujuan untuk mendapatkan kepuasan dari hasil usaha yang telah dilakukan selama ini setelah kebutuhan primernya terpenuhi.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu sentra pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat. Penelitian bersifat penelitian pengembangan dimana penekanannya pada menerangkan dan menjelaskan terkait dengan data dan sumber informasi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, tujuannya untuk mendeskripsikan suatu perurutan atau perkembangan (Syahza, 2021) usahatani kelapa sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian dilaksanakan selama 6 bulan meliputi pengumpulan data, analisis data dan pelaporan.

Populasi dan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah semua petani perkebunan kelapa sawit rakyat yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu. Karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga maka dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 41 petani kelapa sawit rakyat. Teknik sampling yang digunakan yakni purposive dan stratified random sampling dengan pertimbangan skala luas dan model pembangunan perkebunan kelapa sawit. Pembagian populasi kedalam stratum bertujuan agar sampel yang diambil dari setiap stratum dapat merepresentasikan karakteristik populasi yang berukuran besar dan heterogen.

Jenis dan Sumber Data.

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan dari petani yang meliputi: identitas responden (umur, jenis

kelamin, tingkat pendidikan dan pengalaman usahatani), penggunaan tenaga kerja dalam usaha dan upah tenaga kerja, luas lahan, produksi, harga jual dan komponen biaya yang dikeluarkan dalam usaha. Data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah yaitu diantaranya Badan Pusat Statistik (BPS) dan Statistik Perkebunan, Dinas atau Instansi terkait yang membidangi masalah perkebunan yang menyajikan data luas dan produksi kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu.

Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner dengan menyiapkan seperangkat pertanyaan yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan studi literatur untuk mendukung kelengkapan data yang dibutuhkan.

Teknik Analisis Data.

Analisis data digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif, analisis ini untuk mendeskripsikan kondisi aspek sosial dan ekonomi petani kelapa sawit. Aspek sosial dilihat dari variabel luas lahan usahatani dalam satuan hektar (ha), status kepemilikan lahan dari bentuk legalitas kepemilikan dan penguasaan, tingkat pendidikan petani mulai dari tidak tamat SD, SMP sederajat, SLTA sederajat dan Perguruan Tinggi (PT) dan pengalaman usahatani dalam tahun (thn).

Aspek ekonomi dilihat dari produktivitas kelapa sawit dan pendapatan petani kelapa sawit. Produktivitas dihitung dengan satuan kilogram per hektar per tahun (kg/ha/thn), pendapatan petani dihitung berdasarkan satuan Rupiah per hektar per tahun (Rp/ha/bln). Hasil analisis ini disajikan dalam bentuk tabulasi untuk mendeskriptifkan berdasarkan variable dan indicator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Sosial Usahatani Kelapa Sawit Rakyat

Aspek sosial usahatani kepala sawit dapat dilihat dari karakteristik petani kelapa sawit rakyat yang meliputi: luas lahan, status kepemilikan lahan, tingkat pendidikan petani



dan pengalaman usahatani. Lahan merupakan media tumbuhnya tanaman kelapa sawit. Semakin luas lahan yang ditanami kelapa sawit maka semakin banyak produksi kelapa sawit yang bisa dihasilkan. Berdasarkan pengumpulan data di lapangan luas lahan kebun kelapa sawit petani responden dapat disajikan pada Tabel 1.

Luas Lahan Kebun Kelapa Sawit Petani Respdnen

No	Luas Lahan (Ha)	Jumlah	Persentase (%)
1.	1 - 5	33	80,49
2.	6 - 10	4	9,76
3.	11 - 15	3	7,32
4.	16 - 20	1	2,44
	Jumlah	41	100,00

Sumber: Data Olahan

Luas lahan yang dimiliki responden pada umumnya 1-5 ha mencapai 80,49%, responden ini pada umumnya adalah petani swadaya yang melakukan usahatani atas dasar melihat kesuksesan petani Plasma melalui program Transmigrasi Perkebunan Inti Rakyat (Trans-PIR) yang tersebar di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu (Erman, 2017). Selain itu, ketersediaan sumberdaya berupa lahan, akses kepada lembaga keuangan dan keberadaan perkebunan kelapa sawit milik swasta menjadi motivator kepada masyarakat sekitar untuk menjadi petani kelapa sawit (Waddington et al., 2014). Sehingga usahatani kelapa sawit memiliki kepastian hasil dibandingkan dengan usahatani lainnya.

Petani yang memiliki luas lahan 6 hektar keatas merupakan petani yang telah memiliki usahatani kelapa sawit sebelumnya melakukan pengembangan dan petani baru dengan konsep penerapan sistem budidaya yang benar. Petani ini didominasi oleh petani yang memiliki modal dan petani transisi dengan karakteristik mengubah atau menjual kebun yang telah dimiliki dengan membuka lahan baru untuk mendapatkan lahan yang lebih luas dan merubah system budidaya untuk mendapatkan hasil

optimal. Kepemilikan lahan optimal petani swadaya pada skala luas 5 ha, dengan luas tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder (Syahza & Asmit, 2019). Jika kepemilikan luas lahan dibawah 5 ha maka baru mampu memenuhi kebutuhan primer petani, untuk memenuhi kebutuhan sekunder petani melakukan usaha tambahan dengan pekerjaan atau usaha. Sehingga luas lahan yang dimiliki petani mencerminkan tingkat social bagi petani dan masyarakat sekaligus menepis bahwa petani bukan kaum marginal (Susilowati & Maulana, 2012).

Selanjutnya aspek social dilihat dari status kepemilikan lahan petani respnden yang disajikan pada Tabel 2. Legalitas kepemilikan lahan ditunjukkan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) dan bukti penguasaan lahan ditunjukkan dengan kepemilikan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR), Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Tebas Tebang sebagai surat dasar dan surat lainya seperti tanda pengenal lahan (Sembiring, 2006). Dari tabel tersebut diperoleh bahwa responden yang memiliki bukti kepemilikan berupa SHM hanya sebanyak 4 responden atau 9,76%, selebihnya sebesar 90,24% hanya memiliki bukti penguasaan berupa SKGR, SKT dan surat lainya. Bukti penguasaan lahan sangat rentan terjadi konflik dan cenderung potensi kalah ketika sampa ke ranah hukum (Erman, 2017).

Status kepemilikan Lahan Petani Respdnen

No	Status Kepemilikan Lahan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SHM	4	9,76
2.	SKGR	18	43,90
3.	SKT	13	31,71
4.	Surat Tebas Tebang	5	12,20
5.	Surat lainnya	1	2,44
	Jumlah	41	100,00

Sumber: Data Olahan



Responden yang telah memiliki bukti kepemilikan SHM merupakan petani kelapa sawit rakyat yang memperoleh lahan dari pemerintah melalui Trans-PIR, sedangkan responden yang memiliki penguasaan adalah petani swadaya. Hal ini menunjukkan bahwa pada umumnya petani enggan melakukan legalisasi lahan yang menurut responden sangat mahal dan sulit dalam proses pengurusannya. Setelah ditetapkan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 saat ini banyak petani yang tidak bisa meningkatkan haknya dari bentuk penguasaan menjadi kepemilikan karena sebagian besar terkendala masuk dalam kawasan hutan (Manurung et al., 2021). Dengan kondisi tersebut perlu upaya pelepasan dan mekanisme usulan dari petani ke Kementerian terkait sebelum dilakukan sertifikasi lahan.

Saat ini lahan petani baik yang sudah memiliki bukti kepemilikan maupun penguasaan yang terindikasi dalam kawasan hutan tidak dapat mendapatkan akses ke lembaga keuangan dan bantuan dari pemerintah. Untuk itu perlu surat keterangan dari Instansi yang berwenang untuk membuktikan bahwa lahan tersebut tidak dalam kawasan hutan (Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020). Hal ini menambah rangkaian panjang permasalahan dan konflik tenurial baik pada lahan pertanian maupun pada lahan garapan, meskipun konflik yang terjadi merupakan warisan konflik yang belum terselesaikan sebelumnya (Sembiring, 2006). Konflik tenurial terjadi akibat kurang tegas dan tumpang tindih penguasaan, sehingga sering terdapat legalitas ganda pada obyek yang sama baik kepemilikan maupun penguasaan (Marinus Kristiadi Harun, 2014) dan konflik secara status kawasan peruntukannya (Mustofa & Bakce, 2019). Tingginya konflik juga berpotensi mengurangi kesempatan kerja dan kesempatan berusaha akibat ketidaknyamanan dalam berusaha (Mustofa, 2021).

Tingkat Pendidikan Petani Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	10	24,39
2.	SMP	7	17,07
3.	SMA	21	51,22
4.	Sarjana	3	7,32
Jumlah		41	100,00

Sumber: Data Olahan

Berdasarkan tingkat pendidikan responden, saat ini pendidikan petani telah mengalami peningkatan sumberdaya manusia. Petani tidak lagi identic dengan Pendidikan rendah dan kaum marginal, bahkan petani sudah menyadari bahwa sumberdaya manusia dapat mempengaruhi pengelolaan kebun berkelanjutan (Apriyanto et al., 2021). Pada umumnya responden telah tamat SMA dan beberapa telah menyelesaikan Perguruan Tinggi (Sarjana), tingkat Pendidikan dapat dijadikan indicator kesejahteraan petani beserta keluarganya (Syahza & Asmit, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa usahatani perkebunan kelapa sawit harus dikelola oleh sumberdaya yang memadai baik melalui pendidikan formal maupun melalui diklat, latihan dan bimbingan teknis.

Tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada Tabel 3, pendidikan dan penguasaan sumberdaya manusia dapat mencerminkan tingkat produktivitas lahan yaitu berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang dihasilkan (Wigena et al., 2016) dan dapat meningkatkan kesempatan atau peluang pekerjaan (Bakce & Mustofa, 2021). Kontribusi perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu mampu memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja sebanyak 4,86 HOK/ha/bln dimulai dari usaha perawatan dan pemanen. Kesempatan kerja dan berusaha ini berpotensi menjadikan suatu wilayah sebagai



pusat permindahan orang dan barang sebagai cikal bakal pusat agropolitan.

Selanjutnya sumberdaya yang berkualitas petani memegang peranan dalam keberlanjutan usahatani. Sumberdaya manusia dapat diperoleh dari lama atau pengalaman usahatani, petani yang telah mengalami satu siklus pertama maka pada siklus selanjutnya akan lebih baik dalam pengelolaan usahatani (Mustofa, 2021). Satu siklus pengalaman usahatani dihitung selama 30 tahun dimulai dari pembukaan lahan hingga dilakukan replanting. Pengalaman usahatani petani kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 4, dimana mayoritas pengalaman usahatani responden antara 11-20 tahun. Responden yang berhasil ditemui sangat heterogen, terdapat responden petani pemilik kebun dan petani penggarap maupun pekerja kebun, selain mereka melakukan usahatani sendiri juga bekerja untuk petani lain sebagai pengelola kebun. Kebun yang mereka kelola pada umumnya telah menerapkan GAP, sehingga responden dapat secara bertahap mengadopsi system tersebut untuk kebun miliknya.

Pengalaman Usahatani Petani Kelapa Sawit

No	Pengalaman Usahatani (tahun)	Jumlah	Persentase
1	5-10	8	19,05
2	11-15	13	30,95
3	16-20	12	28,57
4	21-25	6	14,29
5	>25	3	7,14
Jumlah		41	100

Sumber: Data Olahan

Bagi responden belum mengalami satu siklus usahatani, akan tetapi dengan ketersediaan modal dan pengetahuan usahatani serta pengalaman yang dimiliki akan berdampak pada penerapan GAP untuk mendapatkan hasil optimal. Ketersediaan sarana dan prasarana seperti bibit unggul, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan). Pada wilayah yang berdekatan dengan perkebunan besar dan plasma terdapat responden yang melakukan replanting kebun kelapa sawitnya sebelum

masuk usia tua. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani sebagai bentuk intensifikasi.

Aspek Ekonomi Usahatani Kelapa Sawit Rakyat

Aspek ekonomi perkebunan kelapa sawit rakyat dilihat dari kegiatan usahatani dilakukan setelah petani memiliki modal berupa lahan dan modal usahatani untuk memproduksi TBS. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit. Kegiatan produksi meliputi pemeliharaan dari hama dan penyakit tanaman, pengendalian gulma, pemberian pupuk, pembuangan pelepah, dan kegiatan penunjang lainnya untuk memelihara tanaman. Tandan buah segar yang dihasilkan oleh petani selanjutnya dijual untuk mendapatkan uang yang menjadi pendapatan utama petani.

Aspek ekonomi yang dibahas dalam penelitian ini adalah produktivitas lahan dan pendapatan petani kelapa sawit rakyat. Produktivitas lahan dan usahatani seluruh responden dihitung selama satu tahun dibagi dengan luas lahan. Produktivitas lahan responden selama satu tahun dapat dilihat pada Tabel 5. Produktivitas tertinggi, terendah dan rerata masing-masing sebesar 2.405 (kg/ha/bln), 279 (kg/ha/bln), 830 (kg/ha/bln). Produktivitas tertinggi merupakan lahan petani swadaya pada umur tanaman 11 – 15 tahun yang dikelola dengan menerapkan prinsip GAP, produktivitas terendah merupakan lahan petani dalam kondisi tanaman tua dan rusak yang telah memasuki usia replanting. Petani sedang menunggu program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk melakukan replanting kebun miliknya.

Produktivitas Lahan Kelapa Sawit Rakyat Petani Responden

Uraian	Produktivitas		
	(kg/ha/bln)	(kg/ha/thn)	Luas (ha)
Tertinggi	2.405	28.860	20



Terendah	279	3.350	0,9
Rerata	830	9.960	4,25

Sumber: Data Olahan

Produktivitas juga dipengaruhi oleh jumlah pokok tanaman, jumlah pokok tanaman yang ideal kelapa sawit antara 128-143 pokok/hektar (Pahan, 2015) tergantung kepada letak dan luas lahan serta jenis bibit yang digunakan. Jumlah pokok tanaman yang dimiliki responden sangat heterogen mulai dari 130 hingga 150 batang/ha. Sedangkan pola tanam terdapat yang berbentuk bujur sangkar, mata lima dan tidak beraturan. Pada umumnya pola tanam mengikuti batas lahan yang dimiliki seperti kontur tanah atau batas alam. Kondisi tersebut sering menjadi kendala dalam pengelolaan, pemanenan dan pengangkutan TBS dapat mempengaruhi produktivitas.

Selanjutnya hasil usahatani perkebunan kelapa sawit rakyat yang meliputi produksi, harga jual, total biaya, pendapatan dan efisiensi usahatani kelapa sawit. Hasil penelitian (Bakce & Mustofa, 2021) menunjukkan bahwa rerata produksi selama tahun 2021 sebesar 830 kg/ha/bln, harga jual Rp. 1.565 /kg, total biaya Rp. 903.443/ha/bln dan pendapatan bersih Rp. 395.474/ha/bln. Secara produktivitas, harga TBS belum mencapai hasil optimal dan harga yang diharapkan jika dibandingkan produktivitas lahan dan harga seharusnya (Pahan, 2015) seperti yang dijadikan pada Tabel 6. Kondisi ini masih jauh dari harapan dalam sertifikasi ISPO terutama pada legalitas lahan, sumber bibit dan pengelolaan lahan.

Kegiatan usahatani kelapa sawit rakyat di wilayah penelitian mampu memberikan sumbangan pendapatan kepada petani sebesar Rp 395.474 per ha/bulan dengan asumsi bahwa semua kegiatan usahatani di kerjakan oleh tenaga kerja yang di beri upah dan dilakukan perhitungan biaya penyusutan tanaman. Jika petani melaksanakan kegiatan usahatani kelapa sawit tidak menggunakan jasa tenaga kerja diluar keluarga maka pendapatan petani lebih

besar Rp. 729.619/ha/bln karena biaya yang dikeluarkan sebagai upah dapat merupakan pendapatan keluarga. Meskipun secara produktivitas dan pendapatan petani masih rendah, akan tetapi bagi petani. Ditinjau dari pendapatan usaha ini secara ekonomi layak karena dapat memberikan sumbangan pendapatan bagi petani.

Hasil tinjauan penelitian tersebut diperoleh bahwa dengan harga yang relative stabil pendapatan petani masih dari rerata nasional (Kementan RI, 2015), petani perkebunan kelapa sawit rakyat terutama pola swadaya rentan terhadap gejolak harga TBS. Gejolak harga yang fluktuatif mempengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan, akan tetapi perkebunan kelapa sawit masih lebih baik dibandingkan dengan usahatani perkebunan lainnya (Syahza, Savitri, et al., 2021). Sehingga usaha ini masih layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan dengan meningkatkan produktivitas.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara sosial, mayoritas luas lahan petani kelapa sawit adalah 1-5 ha, legalitas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat di Kabupaten Indragiri Hulu umumnya masih SKGR dengan tingkat pendidikan petani rerata SLTA sederajat. Ditinjau dari pengalaman usahatani kelapa sawit meunjukkan mayoritas pengalaman usahatani petani antara 11-20 tahun.
2. Secara ekonomi menunjukkan bahwa luas lahan 4,25 ha dengan produktivitas 830 (kg/ha/bln) dan pendapatan bersih Rp. 395.474/ha/bln lebih rendah dari pendapatan petani secara nasional.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibuat beberapa saran masukan antara lain:

1. Perlu dilakukan legalisasi lahan dan peningkatan hak.



2. Perlu dilakukan peningkat produktivitas lahan melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustira, M. A., Amalia, R., & Nurkhoiry, R. (2015). Program Sawit Untuk Rakyat (Prowitra) Sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas , Pemberdayaan , Keberlanjutan , Dan Kesejahteraan Pekebun Kelapa Sawit Rakyat. *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*, 25(1), 315–324.
- [2] Amalia, R., Nurkhoiry, R., Nasution, Z. P. S., & Kurniawan, A. (2017). Case Study of Farmers in Ophir, West Pasaman Regency, West Sumatra Province). *Jurnal Penelitian Kelapa Sawit*, 25(3), 171–182. <https://doi.org/10.22302/iopri.jur.jpks.v25i3.34>
- [3] Apriyanto, M., Partini, Mardesci, H., Syahrantau, G., & Yulianti. (2021). The Role of Farmers Readiness in the Sustainable Palm Oil Industry The Role of Farmers Readiness in t he Sustainable Palm Oil Industry. *Journal of Physics: Conference Serie*, 1764(1), 012211. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1764/1/012211>
- [4] Bakce, R., & Mustofa, R. (2021). Kesempatan Kerja Dan Kelayakan Ekonomi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(7), 2213–2220.
- [5] Choong, C. G., & McKay, A. (2014). Sustainability in the Malaysian palm oil industry. *Journal of Cleaner Production*, 85, 258–264. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.12.009>
- [6] Erman, E. (2017). Di Balik Keberlanjutan Sawit : Aktor , Aliansi Dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa *. *Masyarakat Indonesia*, 43(1), 1–13. <http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/view/751>
- [7] Evizal, R. (2014). Dasar-dasar Produksi Perkebunan. In H. M. Akin (Ed.), *Dasar-dasar Produksi Perkebunan* (Ke-1, pp. 1–27). Graha Ilmu.
- [8] Faizal, M., Wardah, Y., H., Husna, M. A., Amirah, A., & Tan, Y. H. (2018). ENERGY , ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL IMPACT OF PALM OIL BIODIESEL IN. *Journal of Mechanical Engineering Research and Developments (JMERD)*, 41(3), 93–95.
- [9] Kementan RI. (2015). Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO. *Undp*, 1–49. www.rspo.org, www.id.undp.org
- [10] Mahmud, A. (2019). Rekonstruksi Pemikiran Sajogyo Tentang Kemiskinan dalam Perspektif Agraria Kritis. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1), 99. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.322>
- [11] Manurung, G. M. E., Siregar, Y. I., Syahza, A., & Suwondo, S. (2021). Opportunity for Sustainable Palm Oil Practices by Smallholder Farmers in Riau. *Journal of Hunan University (Natural Sciences)*, 48(10), 28–35. <http://jonuns.com/index.php/journal/article/view/785>
- [12] Marinus Kristiadi Harun, & H. D. (2014). MODEL RESOLUSI KONFLIK LAHAN DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN PRODUKSI MODEL BANJAR. *Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 11(4), 265–280.
- [13] Mulono, A., Partini, P., Mardesci, H., Syahrantau, G., & Yulianti. (2021). The Role of Farmers Readiness in the Sustainable Palm Oil Industry. *Journal of Physics: Conference Series*, 1764, 1–7. <https://doi.org/10.1088/1742-6596>
- [14] Mustofa, R. (2021). Komparasi Usahatani Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Kabupaten Rokan Hilir.



- MEDIA BINA ILMIAH*, 15(11), 5667–5674.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33758/mbi.v15i11.1172>
- [15] Mustofa, R., & Bakce, R. (2019). Potensi Konflik Lahan Perkebunan Kelapa Sawit. *Unri Conference Series: Agriculture and Food Security*, 1, 58–66.
<https://doi.org/10.31258/unricsagr.1a8>
- [16] Mustofa, R., Hapsoh, Syahza, A., & Suwondo, S. (2021). *Food Carrying Capacity as an Indicator of Sustainability of Smallholder Oil Palm Plantations in Riau Province*. 11, 111–121.
<https://doi.org/10.48047/rigeo.11.08.11>
- [17] Pahan, I. (2008). *Panduan Lengkap Kelapa Sawit* (R. A. Surip Prayuga (ed.); 5th ed.). Penebar Swadaya.
- [18] Pahan, I. (2012). *Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis dari Hulu Hingga Hilir* (R. Armando (ed.)). Penebar Swadaya.
- [19] Pahan, I. (2015). *Panduan Teknis Budidaya Kelapa Sawit*. (L. H. Apriyanti (ed.); 1st ed.). Penebar Swadaya.
- [20] Purba, J. H. V., & Sipayung, T. (2017). Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, 43(1), 81–94.
<http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipk/article/view/717/521>
- [21] Saeri, M. (2018). *Usahatani Dan Analisisnya* (H. Subagyo (ed.); 1st–136th ed.). Uninda Press.
- [22] Sembiring, J. (2006). Konflik Tanah Perkebunan Di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 13(2), 279–292.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol13.iss2.art9>
- [23] Susilowati, S. H., & Maulana, M. (2012). Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria Farm Business Land Size and Farmers' Welfare: Smallholders' Existence and Agrarian Reform Urgency Lahan pertanian dewasa ini menghadapi tanta. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(1), 28.
- [24] Suwondo, S., Syahza, A., Galib, M., & Oktarianda, R. (2020). Pengembangan Peta Potensi Desa Berbasis Spasial Untuk Mendukung Perencanaan Pembangunan Desa Di Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak. *Jurnal Hilirisasi IPTEKS*, 3(2), 197–210.
<https://doi.org/10.25077/jhi.v3i2.436>
- [25] Suwondo, Syahza, A., Wulandari, S., Darmadi, Gupta, P., Sharma, A. M., Behl, A., Singh, M., Devi, C. U., Bedarkar, M., Pandita, D., Janvale, G., Kendre, S., Mehrotra, S., Hh, R. P., F, D. D. E. D. O. L. D., Hanaysha, J., Ahmad, N., Decramer, A., ... Nasrul, B. (2021). Development of Superior Plantation Commodities Based on Sustainable Development. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 15(1), 51–59.
https://doi.org/https://doi.org/10.18280/ij_sdp.160408
- [26] Syahza, A. (2021). METODOLOGI PENELITIAN. In *Edisi Revisi* (p. 223).
- [27] Syahza, A., & Asmit, B. (2019). Regional economic empowerment through oil palm economic institutional development. *Management of Environmental Quality: An International Journal*, 30(6), 1256–1278. <https://doi.org/10.1108/MEQ-02-2018-0036>
- [28] Syahza, A., & Asmit, B. (2020). Development of palm oil sector and future challenge in Riau Province, Indonesia. *Journal of Science and Technology Policy Management*, 11(2), 149–170.
<https://doi.org/10.1108/JSTPM-07-2018-0073>
- [29] Syahza, A., Bakce, D., Irianti, M., & Asmit, B. (2020). Potential Development of Leading Commodities in Efforts to Accelerate Rural Economic Development



- in Coastal Areas Riau, Indonesia. *Journal of Applied Sciences*, 20(5), 173–181. <https://doi.org/10.3923/jas.2020.173.181>
- [30] Syahza, A., Robin, Suwondo, & Hosobuchi, M. (2021). Innovation for the development of environmentally friendly oil palm plantation in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012014>
- [31] Syahza, A., Savitri, E., Asmit, B., & Meiwanda, G. (2021). Small-scale agricultural product marketing innovation through BUMDes and MSMEs empowerment in coastal areas. *Management Science Letters*, 11(8), 2291–2300. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2021.3.015>
- [32] Syahza, A., & Suarman, S. (2018). Model Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 18(3), 365–386. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2014.v18.i3.154>
- [33] Waddington, H., Snilstveit, B., Hombrados, J., Vojtkova, M., Phillips, D., Davies, P., & White, H. (2014). Farmer Field Schools for Improving Farming Practices and Farmer Outcomes: A Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*, 10(1). <https://doi.org/10.4073/csr.2014.6>
- [34] Wigena, I. G. P., Siregar, H., Sudradjat, N., & Sitorus, S. R. P. (2016). Desain Model Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Plasma Berkelanjutan Berbasis Pendekatan Sistem Dinamis (Studi Kasus Kebun Kelapa Sawit Plasma PTP Nusantara V Sei Pagar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau). *Jurnal Agro Ekonomi*, 27(1), 81. <https://doi.org/10.21082/jae.v27n1.2009> 81-108



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN